

JEGES: Jurnal Eksklusif Generasi Ekonomi Syariah
Vol. 03 No. 02 Juli-Desember 2024
https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/jeges/index

ANALISIS KONSEP *VALUE FOR MONEY* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA KEGIATAN DINAS SOSIAL KABUPATEN MANDAILING NATAL

**Nur Hatikah Siregar¹, Rodame Monitorir Napitupulu², Muhammad
Wandisyah R Hutagalung³, Sulaiman Efendi Siregar⁴**

nurhatikahsiregar@gmail.com¹, rodamenapitupulu@uinsyahada.ac.id²,
wandisyah@iain-padangsidimpuan.ac.id³, Sulaiman@uinsyahada.ac.id⁴

^{1,2,3,4} UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

ABSTRAK

Pengukuran kinerja merupakan faktor penting di dalam suatu organisasi, termasuk juga untuk organisasi sektor publik. Pengukuran kinerja sangat diperlukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan tepat sasaran. Pengukuran kinerja sektor publik termasuk Dinas Sosial dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah kinerja kegiatan program-program Dinas Sosial sudah ekonomis, efisien, dan efektif dalam memberikan *output* kepada masyarakat dan dapat mempertanggungjawabkannya kepada pihak-pihak yang terkait.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dan berkaitan dengan ilmu akuntansi sektor publik yaitu analisis kinerja keuangan dengan menggunakan konsep *value for money* digunakan untuk menilai kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal. Sehubungan dengan itu pendekatan yang dilakukan dalam penelitian adalah teori-teori yang berkaitan dengan kinerja keuangan dan dianalisis dengan konsep *Value for money*, dilihat dari segi ekonomi, efisien, dan efektivitas.

Hasil penelitian ini adalah bahwa untuk kinerja keuangan pada ketiga program Dinas Sosial Kabupaten ekonomi karena <100%, output kegiatan tersebut tercapai secara maksimal yaitu

sebesar <100%. Hal ini menunjukkan Dinas Sosial dapat mengefisienkan anggarannya, serta efektivitas dalam pelayanannya.

Kata Kunci: Konsep *Value For Money*, Kinerja Keuangan Sektor Publik

ABSTRACT

Performance measurement is an important factor in an organization, including public sector organizations. Performance measurement is needed to assess organizational accountability in producing better and more targeted public services. Measurement of the performance of the public sector including Social Service is carried out to fulfill three purposes. First, public sector performance measurement is intended to help improve government performance. Second, public sector performance measures are used for resource allocation and decision-making. Third, public sector performance measures are intended to realize public accountability and improve institutional communication. The purpose of this research was conducted to find out whether the performance of Social Service program activities is economical, efficient, and effective in providing output to the community and can be accountable to related parties. This research is descriptive qualitative research, and is related to public sector accounting, namely financial performance analysis using the concept of value for money is used to assess the activities of the Mandailing Natal District Social Service. In this regard, the approach used in this research is theories related to financial performance and analyzed using the concept of value for money, from an economic, efficient, and effective perspective. The results of this study are that for the financial performance of the three economic district Social Service programs because <100%, the maximum output of these activities is <100%. This shows that the Social Service can streamline its budget, as well as effectiveness in its services.

Keywords: Value For Money Concept, Public Sector Financial Performance

PENDAHULUAN

Menurut Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan dan perlindungan sosial.

Sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan dalam hal ini organisasi ini merupakan organisasi publik yang kegiatannya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tujuan akhirnya untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat ataupun kesejahteraan kepada masyarakat dengan memberikan

program-program yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan tujuan supaya terpenuhinya kebutuhan materi, spritual, dan sosial supaya hidup layak dan mampu mengembangkan dirinya ditengah-tengah masyarakat yang semakin kompleks dengan perkembangan jam yang bersipat material sesuai dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Kesejahteraan Sosial yang telah disinggung pada paragraf sebelumnya maka amanat tersebut diberikan kepada Dinas Sosial fungsinya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dengan memberikan program-program. Dinas Sosial pada dasarnya belum dapat direalisasikan hal ini bisa dilihat dari angka kemiskinan yang terus meningkat Seperti terlihat dalam tabel. Tingkat kemiskinan Kabupaten Mandailing Natal.

Tabel I.I
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Pada Kabupaten Mandailing Natal
Tahun 2017-2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah(ribu jiwa)	48,30	42,39	40,64	41,31	43,24
Persentase	11,02%	9,58%	9,11%	9,18%	9,49%

Sumber: *Sumber Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)*

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kemiskinan tertinggi pada 2017 dengan persentase 11,02% atau sebanyak 48,30 ribu jiwa dan menurun pada tahun 2018 menjadi 9,58% atau sebanyak 42,39 dan menurun normal angka kemiskinan sebesar 40,64 ribu jiwa pada tahun 2019, dan menjadi bertambah sebesar 41,31 ribu jiwa pada tahun 2020 dan bertambah lagi pada tahun 2021 menjadi 43,24 jiwa.

Gambar 1.1
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten
Mandailing Natal Tahun 2017-2021



Sumber: *Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal*

Dari data tersebut membuktikan bahwa Pemerintah belum mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dengan diberikannya mandat kepada Dinas Sosial. Berdasarkan wawancara dengan kepala bidang pemberdayaan fakir miskin yang bernama Bapak Deddi Armansyah, bahwa masyarakat yang termasuk belum sejahtera adalah fakir miskin yang tidak memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, korban bencana alam yang mengakitatnya terganggunya aktivitas-aktivitas mereka dalam melakukan pekerjaan.

TINJAUAN TEORITIK

KERANGKA TEORI

Kinerja

Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program /kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi, yang dilakukan saat visi dan misi adalah setiap pelaksana dari visi dan misi dengan cara memberikan informasi latar belakang kepada pelaksana yang dibutuhkan untuk melakukan mereka secara memuaskan dan sesuai dari keinginan dari kebutuhan yang diinginkan dari organisasi. Secara umum kinerja merupakan prestasi yang ingin dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.

KONSEP *VALUE FOR MONEY*

Pengertian Konsep *Value For Money*

Value for money adalah istilah yang digunakan untuk menilai apakah organisasi telah memperoleh manfaat maksimal dari barang dan jasa yang baik memperoleh manfaat maksimal dari barang dan jasa yang baik memperoleh dan memberikan, dalam sumber daya yang tersedia. Tolak ukur dalam anggaran belanja suatu organisasi, baik organisasi yang berorientasi laba (swasta) maupun organisasi nonprofit (sektor publik) adalah *Value For Money* yang meliputi penilaian efisiensi, efektivitas, dan ekonomi.

PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan publik adalah orang atau organisasi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bekerja melayani kepentingan orang banyak atau masyarakat umum. Sementara itu, menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu :

- a. kelompok pelayanan barang,
- b. kelompok pelayanan administrasi, dan
- c. kelompok pelayanan jasa

METODE PENELITIAN

LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Sosial Mandailing Natal, yang beralamat di Jl. Willem Iskandar No. 11 Dalam Lidang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara. Lokasi penelitian tersebut merupakan lokasi yang bertepatan dengan tempat magang, sehingga penulis merasa terpanggil dan memiliki keinginan kuat untuk meneliti lebih dekat mengenai kinerja keuangan pada kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal. Adapun waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini adalah dimulai dari bulan Juli 2022 sampai dengan selesai.

METODE DAN JENIS PENELITIAN

Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian kualitatif ini adalah metode kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan mengidentifikasi objek sesuai dengan apa yang ada. Tujuan kualitatif deskriptif ini adalah membantu pembaca untuk mengetahui apa yang terjadi di lingkungan dibawah pengamatan, seperti apa kinerja yang berada di latar belakang penelitian, dan seperti apa peristiwa yang terjadi di latar belakang penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar.

SUBJEK DAN OBJEK

Subjek

Subjek adalah target populasi yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Subjek penelitian itu merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkapkan fakta-fakta di lapangan. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang penanganan fakir miskin (Dedi Armansyah), Kepala bidang rehabilitasi (Muhammad Ali), dan Bendahara keuangan (Riski Halomoan).

Objek

Objek Penelitian himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang diteliti. Objek penelitian merupakan sasaran yang hendak dicapai untuk mendapatkan jawaban atau

solusi dari permasalahan yang terjadi. Objek pada penelitian ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal.

Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang di dapat secara langsung dari sumber asli tanpa perantara. Data primer merupakan sumber utama untuk memperoleh jawaban atas penelitian yang diajukan dalam penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini berupa wawancara dengan pihak-pihak yang terkait di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal.

Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang bersumber dari data laporan yang sudah ada.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah pengamatan langsung, wawancara, dan studi dokumentasi. Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian maka yang dijadikan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab atau wawancara langsung dengan bagian-bagian yang berwenang dan pegawai yang terlibat didalam perusahaan. Dalam penelitian ini, yang ingin diwawancarai terdiri dari 3 orang yaitu Kepala Bidang Pemberdayaa Fakir miskin (Deddi Armansyah), Kepala Bidang Rehabilitasi (Muhammad Ali), Bendahara Keuangan (Riski Halomoan).
2. Teknik Dokumentasi, merupakan metode mencari data yang bersumber pada tulisan sehubungan dengan masalah penelitian (pengumpulan data sekunder yang berupa catatan, buku, pedoman, surat kabar, agenda, rapat dan lain-lain) yaitu serangkaian informasi dan dokumen yang berupa laporan realisasi anggaran kegiatan dinas sosial kabupaten Mandailing Natal.

TEKNIK ANALISIS DATA

Dalam hal ini, data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode rasio dengan membandingkan hasil dari perhitungan rasio terhadap laporan realisasi anggaran kegiatan Dinas Sosial . Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan *Value For Money* dengan menggunakan tiga elemen yaitu:

1. Pengukuran Ekonomi

Pengukuran ekonomi berkaitan dengan pemerolehan *input* dengan kualitas tertentu dengan harga terendah. Hal ini dapat diketahui dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan anggaran yang telah disetujui. Kinerja pemerintah daerah akan dikatakan ekonomis adalah apabila dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

$$\text{Rasio ekonomi} = \frac{\% \text{Input}}{\% \text{Biaya Input}} \times 100\%$$

2. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi adalah hubungan antara *input* dan *output* dimana barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi digunakan untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan rasio antara *output* dan *input*. Kinerja pemerintah daerah akan dikatakan efisien adalah apabila mencapai *output* yang optimum.

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\% \text{Output}}{\% \text{Input}} \times 100\%$$

Dimana hasil dari *output* merupakan persentase perhitungan realisasi fisik dilapangan dari setiap kegiatan yang ada, sedangkan nilai *input* merupakan persentase antara dana yang digunakan dengan yang dianggarkan dari anggaran pendapatan.

3. Pengukuran Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya tersebut. Suatu organisasi sektor publik dapat dikatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja pemerintah daerah akan dikatakan efektif adalah apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka dikatakan efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat organisasi, telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut.

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\% \text{Outcome}}{\% \text{Output}} \times 100\%$$

TEKNIK PENJAMIN KEABSAHAN DATA

Dalam penelitian ini peneliti menguji keabsahan data dengan menggunakan triangulasi. Biasanya teknik triangulasi merujuk pada suatu proses pemanfaatan persepsi atau pendapat yang beragam untuk mengklasifikasikan makna. Langkah triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek data atau menguji kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dengan cara :

1. Triangulasi yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut. Triangulasi sumber yaitu mengkaji data, hal ini dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. Terbangunnya kerjasama kemitraan antara pengusaha dan kelompok usaha fakir miskin, berkembangnya geografi informasi sistem (GIS) bagi petugas dan pendamping pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah sosial dan lainnya. Program-program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:

- a) Peningkatan pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin melalui bimbingan motivasi, pelatihan keterampilan usaha dan pemberian modal usaha.
- b) Membangun kerjasama kemitraan antara pengusaha dengan kelompok fakir miskin.
- c) Peningkatan pemberdayaan komunitas adat terpencil secara bertahap, mengembangkan geografi informasi sistem (GIS) bagi pemetaan.
- d) Peningkatan kemampuan (*capacity building*) bagi petugas dan pendamping pemberdayaan sosial fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan PMKS lainnya.
- e) Peningkatan dukungan administrasi dan operasional.

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi korban bencana alam dan sosial, sehingga dapat memberikan jaminan kesejahteraan sosial bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), terlaksananya bantuan sosial bagi korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah dan terlaksananya sistem jaminan sosial kesejahteraan sosial bagi fakir miskin, penduduk daerah kumuh dan PMKS lainnya, program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:

- a) Menyediakan bantuan dasar pangan, sandang, papan dan fasilitas bantuan tanggap darurat bagi korban bencana alam, bencana sosial dan PMKS lainnya.
- b) Menyediakan bantuan pemulangan/terminasi bagi korban bencana alam, bencana sosial, pekerja migran bermasalah dan orang terlantar.

- c) Menyediakan bantuan stimulan bahan bangunan rumah bagi korban bencana alam dan bencana sosial.
- d) Memberikan bantuan persiapan bagi daerah penerima pengungsi dan pekerja migran bermasalah.
- e) Memberikan bantuan bagi korban tindak kekerasan melalui usaha ekonomi produktif.

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Program ini bertujuan untuk memulihkan fungsi sosial dan memberikan bantuan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi para PMKS untuk kelangsungan hidup dan pengembangannya. Program ini juga bertujuan agar terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasana rehabilitasi sosial; terlaksananya pembinaan, pelayanan dan perlindungan sosial hukum bagi korban eksploitasi perdagangan perempuan dan anak serta korban tindak kekerasan, terlaksananya pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak disabilitas, dan anak nakal serta lanjut usia; terlaksananya pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma center dan terlaksananya kampanye, advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi serta konseling mengenai arti eksploitasi perdagangan perempuan dan anak, kekerasan dan masalah kesejahteraan sosial lainnya.

Pengukuran Ekonomi

Pengukuran ekonomi berkaitan dengan pemerolehan *input* dengan kualitas tertentu dengan harga terendah. Hal ini dapat diketahui dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan anggaran yang telah disetujui. Kinerja pemerintah daerah akan dikatakan ekonomis adalah apabila dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

$$\text{Rasio ekonomi} = \frac{\% \text{Input}}{\% \text{Biaya Input}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan kemudian diklasifikasikan sesuai persentase penilaian:

Tabel III.I

Persentase Penilaian Ekonomi

No	Persentase	Penilaian
1	90-100	Sangat ekonomis
2	80-89.99	Ekonomis
3	70-79.99	Cukup Ekonomis
4	60-69.99	Kurang Ekonomis

5	<59,99	Tidak ekonomis
---	--------	----------------

Sumber : *Keppmendagri No.600.900-327 Tahun 2019*

Pengukuran Efisiensi

Efisiensi adalah hubungan antara *input* dan *output* dimana barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi digunakan untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan rasio antara *output* dan *input*. Kinerja pemerintah daerah akan dikatakan efisien adalah apabila mencapai *output* yang optimum.

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\% \text{Output}}{\% \text{Input}} \times 100\%$$

Dimana hasil dari *output* merupakan persentase perhitungan realisasi fisik dilapangan dari setiap kegiatan yang ada, sedangkan nilai *input* merupakan persentase antara dana yang digunakan dengan yang dianggarkan dari anggaran pendapatan.

Hasil perhitungan kemudian diklasifikasikan sesuai persentase penilaian:

Tabel III.II

Persentase Penilaian Efisiensi

No	Persentase	Penilaian
1	90-100	Sangat efisiensi
2	80-89.99	Efisiensi
3	70-79.99	Cukup efisiensi
4	60-69.99	Kurang efisiensi
5	<59,99	Tidak efisiensi

Sumber : *Keppmendagri No.600.900-327 Tahun 2019*

Pengukuran Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya tersebut. Suatu organisasi sektor publik dapat dikatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja pemerintah daerah akan dikatakan efektif adalah apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka dikatakan efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat organisasi, telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut.

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\% \text{Outcome}}{\% \text{Output}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan kemudian diklasifikasikan sesuai persentase penilaian:

Tabel III.III
Persentase Penilaian Efektivitas

No	Persentase	Penilaian
1	90-100	Sangat efektivitas
2	80-89.99	Efektivitas
3	70-79.99	Cukup efektivitas
4	60-69.99	Kurang efektivitas
5	<59,99	Tidak efektivitas

HASIL PENELITIAN

PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA.

Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keberdayaan sosial keluarga fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. Menurut hasil wawancara dengan Bapak kabid Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya, program ini mendapatkan dana setiap tahunnya, dimana dana yang diperoleh pada tahun 2019-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.I

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya, Tahun 2019-2021

No	Tahun	Anggaran program (Biaya <i>Input</i>)	Realisasi anggaran
1	2019	290.920.103	235.645.283
2	2020	218.190.077	172.370.160

3	20	214.381.065	171.504.852
	21		

Untuk mengetahui apakah program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya, di Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal telah berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektifitas jika diukur dengan konsep *value for money*, maka langkah-langkah pengukuran *value for money* pada program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT), dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi korban bencana alam dan sosial, sehingga dapat memberikan jaminan kesejahteraan sosial bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), terlaksananya bantuan sosial bagi korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah dan terlaksananya sistem jaminan sosial kesejahteraan sosial bagi fakir miskin, penduduk daerah kumuh dan PMKS lainnya. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Bendahara, program ini mendapatkan dana setiap tahunnya, dimana dana yang diperoleh pada tahun 2019-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.II

Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Tahun 2019-2021(Dalam Ribuan Rupiah)

No	Tahun	Anggaran program (Biaya <i>Input</i>)	Realisasi anggaran
1	2019	186.305.993	178.928.275
2	2020	139.343.819	118.442.246
3	2021	144.766.312	115.812.249

Untuk mengetahui apakah program perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial, di Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal telah berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektifitas jika diukur dengan konsep *value for money*, maka langkah-langkah pengukuran *value for money* pada program perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial lainnya.

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Program ini bertujuan untuk memulihkan fungsi sosial dan memberikan bantuan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi para PMKS untuk kelangsungan hidup dan pengembangannya. Program ini juga bertujuan agar terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasana rehabilitasi sosial; terlaksananya pembinaan, pelayanan dan perlindungan sosial hukum bagi korban eksploitasi perdagangan perempuan dan anak serta korban tindak kekerasan, terlaksananya pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak disabilitas, dan anak nakal serta lanjut usia; terlaksananya pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma center dan terlaksananya kampanye, advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi serta konseling mengenai arti eksploitasi perdagangan perempuan dan anak, kekerasan dan masalah kesejahteraan sosial lainnya, Menurut hasil wawancara dengan Bapak Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, program ini mendapatkan dana setiap tahunnya, dimana dana yang diperoleh pada tahun 2019-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.III
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Tahun 2019-2021(Dalam Ribuan Rupiah)

N o	Tah un	Anggaran program (Biaya <i>Input</i>)	Realisasi anggaran
1	201 9	251.925.512	209.098.174
2	202 0	206.392.843	179.561.773
3	202 1	248.924.605	211.600.000

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal

Untuk mengetahui apakah program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, di Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal telah berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektifitas jika diukur dengan konsep *value for money*, maka langkah-langkah pengukuran *value for money* pada program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial lainnya.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada program pemberdayaan fakir miskin, komunitas dan adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya pada tahun 2019 menghasilkan tingkat ekonomi sebesar 81% ,pada tahun 2020 menghasilkan tingkat ekonomi sebesar 79% masuk dalam kategori cukup ekonomis, pada tahun 2021 menghasilkan tingkat ekonomi sebesar 80%. masuk dalam kategori ekonomis, serta berjalan secara efisien dan efektivitas.
2. Pada program perlindungan dan jaminan sosial pada tahun 2019 menghasilkan tingkat ekonomi sebesar 96,04% dalam persentase masuk dalam kategori sangat ekonomis, pada tahun 2020 menghasilkan tingkat ekonomi sebesar 85% masuk dalam kategori ekonomis, dan pada tahun 2021 menghasilkan tingkat ekonomi sebesar 80%. masuk dalam kategori ekonomis, serta berjalan secara efisien dan efektivitas.
3. Pada program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial pada tahun 2019 menghasilkan tingkat ekonomi sebesar 83% dalam persentase masuk dalam kategori ekonomis, pada tahun 2020 menghasilkan tingkat ekonomi sebesar 87% masuk dalam kategori ekonomis, dan pada tahun 2021 menghasilkan tingkat ekonomi sebesar 85%. masuk dalam kategori ekonomis, serta berjalan secara efisien dan efektivitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul halim Muhammad Syam Kusufi, Akuntansi Sektor Publik, Jakarta: Salemba Empat, 2019.
- Al-fatih, Al-qur'anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab, AN-Najm Ayat 39, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka,2020.
- Al-fatih, Al-qur'anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab, At-Taubah Ayat 105, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka,2020.
- Arfa Ikhsan dan Imam Ghozali, Metode Penelitian Untuk Akuntansi Dan Manajemen, Medan: PT. Madju Medan Cipta, Cet Ke-1, 2006.
- Badan Pusat statistik. "Persentase Penduduk Miskin Mandailing Natal." Badan pusat Statistik kabupaten Mnadailing natal, 2020.
- coulter, Stephen P. Robbin mary. *Manajemen*. Indonesia: PT. Macanalaya Cemerlang, 2019.

- Debby tamara Enre. “Analisis Value for Money Anggaran Pendapatan Pada Kota Medan.” Skripsi, Universitas Islam Negri Sumatera Utara, 2020.
- Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2016
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018.
- . *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018.
- . *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2018.
- . *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2019.
- . *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2020.
- Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia. “Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020,” 2020.
- Muhammad Syam Kusufi, Abdul halim. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat, 2019.
- Nova Kurniawati dan vidya Vitta Adhivinna. “Analisis Penerapan Konsep Value for Money Pada Pemerintah Kabupaten Bantul.” *Dalam Jurnal Analisis Penerapan Konsep Value for Money Pada Pemeintah*, 2017.
- R. Wayne Mondy. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga, 2020.
- Risa Dwi Agustin. “Konsep Value for Money Dalam Mengukur Kinerja Pelayanan Sektor Publik.” *Dalam Jurnal Ilmu Riset Dan Akuntansi* 6 No.6 (2017).
- . *Konsep Value for Money Dalam Mengukur Kinerja Pelayanan Sektor Publik*. Vol. 6 no.6. dalam jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 2017.
- Riski halomoan. Bendahara Keuangan Dinas Sosial. Wawancara, 27 juli Pukul 15.00 WIB.
- Sayuti jamalluddin. “Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas Dan Konsep Valur for Money Dalam Penngelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik(Studi Pada Kantor BAPPEDA Sulawesi Selatan).” *Dalam Jurnal Ilmiah Akuntansi* 1.no.1 (2018).
- Zhalsa Ramadhani Nur Hidayat. “Pengukuran Kinerja Program Bantuan Sosial Covid-19 Dengan Menggunakan Indikator Value for Money Pada Pemerintahan Kota Makassar.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2021.